Judul : Anggaran Riset Minim: DPR Merasa Malu Dengan Malaysia
Tanggal : Jumat, 28 Juni 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7



Anggaran Riset Minim

DPR Merasa Malu Dengan Malaysia

ANGGOTA Komisi V DPR Bambang Haryo Sukartono prihatin dengan minimnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk riset-riset yang berdaya guna. Padahal, maju mundurnya suatu bangsa ditentukan dari banyaknya riset-riset yang dihasilkan para peneliti.

Bambang menuturkan, idealnya pemerintah menganggarkan minimal dua persen dari total alokasi belanja untuk kemajuan riset. Namun yang terjadi, anggaran untuk riset ini sangat minim. Sangat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia, Vietnam, bahkan Thailand yang berani mengalokasikan paling sedikit Rp 22 triliun untuk riset.

"Riset ini di seluruh negara-negara minimal dua persen dari anggaran. Litbang itu dua persen. Sangat jauh dari yang kita alokasikan. Kita malu PDB sebesar 80 persen sementara Indonesia baru 29,4 persen. "Nah kalau kita utang lebih nanti Bu Menkeu disebutnya ratu utang lagi," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Anggapan bahwa anggaran riset hanya sebesar Rp 2 triliun, sambung politisi PDI Perjuangan ini, juga pendapat keliru. Sebab nyatanya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk riset total sebesar Rp 18,9 triliun. "Total riset kita itu Rp 18,9 trilium, bukan Rp 2 triliun, sebagaimana dalam rapat kerja dijelaskan Menteri Keuangan. Memang di DPR sedang proses pansus RUU untuk Badan Riset Nasional. (Tapi) sudah ada dana abadi riset Rp 900 miliar," tuturnya.

Terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta hasil-hasil riset dan inovasi yang dihasilkan para peneliti Ke

triliun untuk riset. Singapura dan Thailand bahkan jauh lebih besar. Vietnam juga demikian. Sementara kita itu hanya sekitar Rp 2 triliun saja," kata Bambang.

Makanya, kata dia, koleganya yang berada di Komisi VII DPR, yang merupakan komisi yang membidangi riset, perguruan tinggi, dan lingkungan hidup, meminta agar anggaran riset bisa lebih diperhatikan utamanya yang ada di Ristek Dikti.

"Negara kita butuh riset yang lebih kuat jadi mohon anggaran Ristek Dikti diperhatikan. Saya berharap ke depannya pemerintah bisa menaikkan anggaran di bidang riset demi kemajuan bangsa Indonesia. Cari yang terbaik untuk kepentingan rakyat," tambah dia.

Pimpinan Banggar Said Abdullah tidak sependapat jika asumsi pengalokasian anggaran riset untuk belanja Tahun Anggaran 2020 mengambil sampel Malaysia. Menurutnya, memang alokasi belanja riset oleh Pemerintah Malaysia cukup tinggi.

Namun dia mengingatkan, perbandingan utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia dengan Indonesia sangat tinggi. Malaysia utang terhadap pat mungkin bisa diadopsi oleh para petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. "Kita integrasikan local wisdom dengan kajian ilmiah," kata Amran.

Salah satu riset pertanian yang efektif mengangkat kesejahteraan petani, kata Amran, adalah optimalisasi lahan rawa. Amran menuturkan, jika dulu lahan rawa tidak bisa ditanami karena saat musim hujan banjir sementara saat musim kemarau tanahnya asam, namun melalui riset yang berkelanjutan, lahan rawa kini bisa menjadi lahan yang sangat produktif.

"Program pengembangan lahan rawa ini bukan mimpi di siang bolong karena Kementan telah membuktikan banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin," katanya.

Amran menegaskan, sudah ada beberapa daerah lahan rawa yang terbukti mampu menjadi penyumbang produksi pangan nasional. Di antaranya, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Menurut dia, dua daerah ini bisa menjadi penyumbang pangan nasional melalui pengembangan lahan rawa melalui Program Serasi atau Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani. ■ KAL